

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KAMPUNG ANSUS DISTRIK YAPEN BARAT

Antonius Sukohedi

Tenaga Pengajar Pada Program Studi Teknik Arsitektur

Alamat : Perum Dosen USTJ Jl. Raya Sentani Abepura

ABSTRAK

Rumah beserta lingkungannya yang belum memenuhi syarat rumah dan lingkungan yang sehat umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, khususnya ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut dijumpai pada Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen yang menjadi lokasi penelitian. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan hal ini semakin diperparah oleh perilaku yang tidak menyadari pentingnya kebersihan dan keseimbangan lingkungan seperti pembuangan sampah dan air limbah rumah tangga ke laut.

Memburuknya kualitas permukiman pada lokasi penelitian, maka diperlukan suatu studi untuk meningkatkan kualitas. Terkait hal tersebut, maka dilakukan penelitian pada Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner guna memperoleh berbagai informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pandangan dan pengetahuan masyarakat tentang kondisi permukiman yang sehat, tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu digunakan juga metode kuantitatif berupa analisa mengenai tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi rumah dan sarana prasarana (perhitungan sarana prasarana yang ideal sesuai standar permukiman).

Kata Kunci : Penataan Permukiman, Sarana, Prasarana, Kualitas Lingkungan, Kualitas Permukiman

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau besar dan kecil, serta mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km. Hal ini menjadikan kondisi geografis sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai atau daerah pesisir.

Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah makro dari lokasi penelitian merupakan salah satu Kabupaten di kepulauan Papua yang memiliki luas wilayah kawasan pesisir sangat dominan dalam wilayah administrasinya.

Sebagai wilayah pesisir, masyarakat lokal di wilayah ini mengandalkan sektor perikanan laut sebagai mata pencaharian utamanya. Kondisi tersebut sangat mudah dikenali dari eksisting pada Kabupaten tersebut yang didalamnya tersebar beberapa permukiman nelayan di wilayah pesisir. Senada dengan hal itu, pada Kampung Ansus yang menjadi lokasi penelitian merupakan salah satu kampung

permukiman nelayan yang berada di kawasan pinggiran pantai.

Permasalahan permukiman di kampung Ansus yang teridentifikasi menunjukkan bahwa pada kampung tersebut kuantitas maupun kualitas sarana prasarana permukimannya kurang memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan permukiman tersebut.

Seperti karakteristik ekonomi masyarakat di perkampungan wilayah pesisir yang pada umumnya tergolong kecil, pada kampung Ansus hal yang sama juga teridentifikasi. Mayoritas masyarakat yang menempati wilayah ini adalah masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam melakukan kegiatan mereka, yaitu kegiatan melaut untuk mencari ikan masih dilakukan secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca (alam), sehingga hal ini turut mempengaruhi penghasilan mereka yang cenderung kecil dan tidak menentu.

Faktor ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas permukiman, semakin kecil atau rendah penghasilan masyarakat konsekuensi logisnya adalah kualitas lingkungan dan permukiman yang juga cenderung rendah atau tidak memadai.

Permasalahan kualitas permukiman tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang dapat disepelekan, sebab hal ini memiliki keterkaitan dengan komponen lingkungan hidup lainnya yang sangat kompleks, seperti permasalahan buruknya prasarana dasar permukiman akan berdampak pada rusaknya kualitas lingkungan hidup sekitarnya, dan tidak menutup kemungkinan permasalahan permukiman dapat menjadi salah satu akar permasalahan rusaknya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu permasalahan permukiman bersifat urgensi, yaitu mendesak atau harus segera ditangani secara serius.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan pada wilayah penelitian, yaitu :

1. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan perumahan yang layak.
2. Kondisi bangunan berada di atas air (*nelayan*) termasuk dalam kategori non permanen yang tersebar hampir di seluruh Kampung Ansus yaitu Ansus I dan II.
3. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pada lokasi penelitian, yang mana dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk secara alami ataupun migrasi penduduk.

1.3 Tinjauan Pustaka

Permukiman

Menurut Mustafa (2000), permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungnya. Permukiman sendiri akan terbentuk karena manusia memerlukan tempat untuk tinggal dan bernaung, dimana dahulu kala manusia bermukim di tempat-tempat yang tersedia secara alami seperti goa-goa ataupun di pohon-pohon. Tetapi dengan meningkatnya teknologi maka manusia saat ini dapat bermukim di rumah, sehingga terbentuklah

daerah perumahan atau pemukiman. Ada beberapa saran yang digunakan oleh Lemuel Shattuck (1850) dalam soemitrat (1994), terhadap sanitasi lingkungan permukiman yang baik yaitu : a). Tersedianya air yang aman dan cukup, b). Tersedianya ventilasi baik di dalam atau luar ruang, c). Tersedianya drainase, d). Penyaluran air buangan yang baik, dan e). Kebersihan lingkungan, baik rumah maupun permukiman.

Hal tersebut diatas perlu didukung oleh kemampuan lingkungan itu sendiri yaitu ketersediaan sumber daya yang ada, jumlah populasi yang memadai, hal ini berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan, penyebaran penduduk yang seimbang, sehingga kompetisi dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menjadi seimbang.

Permukiman Dan Permasalahannya

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang kawasan siap bangun yang berdiri sendiri, yang dimaksudkan dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar dari kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah tempat tinggal sekelompok orang atau lebih untuk melangsungkan kehidupannya baik dalam aktifitas lokal maupun kota, baik untuk tempat tinggal, berlindung, dan melangsungkan keturunan. Dalam pengertian terbatas Pemukiman ialah tempat dimana orang/manusia berlindung atau melindungi diri dari pengaruh alam antara lain panas, hujan, dan sebagainya. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana ruang yang terstruktur.

Keberadaan permukiman harus mendukung RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), Pola Dasar Pembangunan Daerah, RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota), dan RTRK (Rencana Tata Ruang Kota). Permukiman juga harus sesuai dengan peruntukan tanah, dan bentuk

sentral primer, sentral sekunder, sentral tersier, sentral lokal, sentral lingkungan, dan tempat pelayanan di daerah permukiman baru.

Permukiman juga dilengkapi oleh jaringan sarana dan prasarana serta didukung oleh lahan yang tersedia. yang dilengkapi kantor perusahaan, fasilitas olahraga, dan rekreasi, sosial, kesehatan, pendidikan dan pasar, disamping itu juga ada daerah pengembangan Ribbon (memanjang), yaitu pengembangan kegiatan jasa, komersial, dan perkantoran disepanjang sisi jalan.

Pembangunan permukiman sebagai bagian dari fasilitas sosial, bertujuan untuk meningkatkan pola hidup manusia dalam interaksi dengan lingkungan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Selain untuk tempat aktifitas, permukiman juga memerlukan pelayanan yang baik dalam fisik permukiman tersebut. Secara fisik pembangunan permukiman merupakan pembagunan akan lahan sehingga fungsi lahan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu pembangunan fisik kota maupun desa.

Secara umum nilai guna suatu lahan pada saat tertentu mengalami perubahan nilai (harga) sejalan dengan perkembangan kota namun nilai pemanfaatan akan lahan sendiri tidak mengalami perubahan fisik oleh karena itu semakin padatnya tingkat kegiatan pembangunan kota maka lahan kota semakin tidak mencukupi pula.

Permasalahan yang sering dihadapi kota sejalan dengan perkembangan kota adalah tingkat kepadatan akan lahan, perkembangan lahan kota bukan hanya sebagai tempat pembangunan tetapi juga merupakan tempat interaksi masyarakat. Keterbatasan akan lahan ini secara umum hampir disetiap kota-kota besar dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami kota sehingga tata guna lahan kota sering menjadi acuan walaupun ini juga sering menjadi masalah karena perkembangan kota tidak sejalan dengan perkembangannya.

Semakin tinggi pemanfaatan lahan sering mengakibatkan pergeseran akan tata guna lahan sebagaimana permasalahan yang sering timbul dalam permasalahan tanah perkotaan dimana semakin padatnya suatu peruntukan lahan akan mengalami pergeseran dan

mempengaruhi pemanfaatan lahan yang lain atau acuan tata guna lahan yang ada. Dengan pengaruh pergeseran lahan tersebut maka fungsi dan guna lahan pada sektor lahan lain menjadi terganggu.

Permasalahan tentang permukiman tidak pernah berhenti, lahan yang padat dan kepadatan yang tinggi, lingkungan yang kotor akibat tercecernya sampah-sampah karena sudah tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) atau jika pun ada sudah tidak dapat lagi menampung banyaknya sampah yang ada, becek, saluran drainasenya macet, gelap, pengap, mudah terjadi kebakaran, banyaknya alat, dan sulit parkir, hampir selalu dijumpai, lokasi yang kurang strategis, bangunan yang kualitasnya rendah, pedagang kaki lima yang menghambat jalan masuk ke permukiman, pembayaran retribusi yang tidak lancar, tidak memiliki izin membangun bangunan (IMB), kesemuanya turut menghambat upaya perwujudan permukiman yang indah, aman, dan nyaman.

Persyaratan Suatu Permukiman

Dapat dirumuskan secara sederhana bagaimana suatu permukiman yang baik, harus memenuhi ketentuan berikut:

- Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
- Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah. Idealnya setiap rumah dapat dilayani oleh fasilitas air bersih. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah kadang-kadang tiak mungkin untuk dilakukan karena mereka tidak mampu menanggung biaya sambung. Oleh karena itu maka dapat dilayani dengan hidran umum atau tangki-tangki air bersih.
- Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor atau tinja, yang dapat dibuang dengan sistem individual yaitu tanki septic

dan lapangan rembesan, ataupun tanki septic komunal. Untuk permukiman dengan bangunan yang padat, maka perlu dibuat sistem perpipaan air kotor.

f. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

g. Dilengkapi oleh fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.

h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Ketentuan Pembangunan Permukiman

Pembangunan sebuah permukiman harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam KEPMEN PU NO. 441/KPTS/1998 tanggal 10 November 1998, tentang persyaratan teknis bangunan gedung:

1) Peletakkan Bangunan. Bangunan harus terletak pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau disahkan, antara lain : a). Lokasi yang dipilih pada daerah yang strategis dengan pencapaian yang mudah dari fungsi-fungsi lain yang berkaitan erat, b). Lokasi dipilih pada daerah yang terhindar dari bencana (banjir, daerah gempa dan tanah yang labil), c). Harus memperhatikan ketentuan kepadatan bangunan (KDB), d). Lokasi harus disepakati oleh masyarakat dan disahkan oleh berwenang, dan e). Lokasi sedapat mungkin menggunakan lahan yang kurang produktif.

2) Arsitektur dan Lingkungan. Persyaratan teknis terkait arsitektur dan lingkungan adalah : a). Penempatan bangunan tidak boleh mengganggu fungsi-fungsi lain seperti lalu lintas dan ketertiban umum, b). Penampilan bangunan sedapat mungkin disesuaikan dengan karakteristik bangunan setempat dan memenuhi syarat keindahan dan keserasian, c). Hindarkan kelengkapan-kelengkapan (aksesoris) yang tidak fungsional, d). Biaya semurah mungkin namun tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kenyamanan, e). Setiap ruang daripada bangunan harus mendapat pencahayaan dan penghawaan alami, f). Bangunan harus dilengkapi dengan fungsi-fungsi penunjang seperti kamar mandi, WC umum, air bersih, gudang, tempat ibadah, parkir dan lain-lain, g). Penambahan fungsi bangunan harus

tetap memperhatikan bentuk-bentuk arsitektur dan keselamatan bangunan, dan h). Sedapat mungkin tetap memperhatikan landscape atau ruang hijau untuk kepentingan ekologi.

3) Keamanan Bangunan. Ketentuan teknis bangunan menyangkut keamanan meliputi : a). Keamanan bangunan terhadap gaya-gaya dan beban diluar dan didalam bangunan dipengaruhi oleh pemeliharaan struktur penggunaan konstruksi, penggunaan bahan bangunan dan cara pelaksanaan konstruksi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, b). Pengawasan konstruksi harus dilakukan oleh ahlinya, dan c). Sedapat mungkin memperhatikan pengamanan bangunan, jarak bangunan terhadap bangunan lain dan kelengkapan bangunan.

4) Kenyamanan Bangunan. Terkait kenyamanan bangunan ketentuan teknis meliputi : a). Desain bangunan diupayakan agar seluruh ruang mendapat cahaya alami, b). Penghawaan alami ditentukan oleh ketinggian bangunan bukan ruang/sirkulasi, volume udara di dalam ruang, jumlah barang dan manusia di dalam ruang, dan c). Pencahayaan alami ditentukan oleh ketinggian bangunan, bukan ruang, jarak bangunan.

5) Batasan Permukiman. Untuk ketentuan teknis menyangkut batasan permukiman adalah : a). Permukiman merupakan fasilitas tempat tinggal bagi tiap orang untuk melakukan setiap aktivitasnya, b). Permukiman yang dimaksud merupakan bagian dari sistem perekonomian yang mempunyai akses atau hubungan terhadap fungsi-fungsi lain, dan c). Cakupan dari permukiman yang dimaksud disini adalah sebagai embrio pusat pertumbuhan.

6) Prasarana Bangunan Permukiman Ketentuan teknis bangunan menyangkut prasarana bangunan permukiman : a). Permukiman harus mempunyai jalan akses untuk memudahkan pencapaian yang memperhitungkan, b). Pembuatan jalan akses mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada, c). Sedapat mungkin disiapkan parkir kendaraan/halaman parkir, d). Pemukiman harus dilengkapi sarana air bersih, e). Pemukiman yang baik harus dilengkapi dengan penanggulangan limbah/sampah, dan f). Pemukiman harus dilengkapi

dengan sistem drainase/pembuangan air hujan.

7) Sarana Penunjang. Ketentuan teknis untuk sarana penunjang : a). Sarana penunjang sebaiknya tidak mengganggu fungsi dan kegiatan permukiman, b). Peletakkan sarana penunjang sedemikian rupa sehingga masih dibenahi oleh pengguna, dan C). Yang dimaksud dengan sarana penunjang di atas adalah KM/WC.

8) Utilitas

Ketentuan teknis bangunan menyangkut utilitas : a). Apabila telah tersedia fasilitas

listrik, pemasangan instalasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperhatikan faktor-faktor keindahan, dan b). Perlu tersedia fasilitas pelayanan telepon dan telepon umum (Telekomunikasi).

Indikator Pengklasifikasian Permukiman Kumuh

Berdasarkan standar permukiman yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya, maka untuk mengukur pengklasifikasian permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran Masing-masing Indikator Dalam Pengklasifikasian Permukiman Kumuh

Indikator	Nilai				
	Sangat Kumuh	Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
Fasilitas Tanah	>70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Ferekuensi Penguasa Bangunan	>70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Frekuensi Bencana Korban	> kali / Thn	5 – 6 Kali/Thn	3 – 4 Kali/Thn	1 – 2 Kali/Thn	0 Kali/Thn
Frekuensi Bencana Banjir	> kali / Thn	5 – 6 Kali/Thn	3 – 4 Kali/Thn	1 – 2 Kali/Thn	0 Kali/Thn
Frekuensi Bencana Tnh Longgsor	> kali / Thn	5 – 6 Kali/Thn	3 – 4 Kali/Thn	1 – 2 Kali/Thn	0 Kali/Thn
Tingkat Kepadatan Penduduk	750	750 – 700	700 – 600	600 – 500	500 – 250
	500	500 – 450	450 – 350	350 – 250	250 – 150
	250	250	225 – 200	200 – 150	150 – 100
Rata-rata anggota rumah tangga	> 13 Jiwa/KK	11-13 Jiwa/KK	8 – 11 Jiwa/KK	5 – 7 Jiwa/KK	< 5 Jiwa/KK
Jumlah KK/Rumah	> KK / Rmh	> 4 KK/Rmh	> 3 KK/Rmh	> 2 KK/Rmh	1 KK/Rmh
Tingkat pertumbuhan penduduk	> 2,5 %	2,1 – 2,5 %	1,6 – 2,0 %	1,0 – 1,5 %	1,0 %
Angka Kematian Kasar	> 40 %	31 – 40 %	21 – 30 %	11 – 20 %	< 10 %
Status Gizi Balita	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Angka Kesakitan Malaria	> 20 %	16 – 20 %	11 – 15 %	6 – 10 %	< 5 %
Angka Ksedakitan diare	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Angka Kesakitan Demam Berdarah	> 20 %	16 – 20 %	11 – 15 %	6 – 10 %	< 5 %
Tiungkat Kualitas Bangunan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Tingakt Kepadatan Bangunan	> 200 U/Ha	151-200 U/Ha	101-150 U/Ha	51-100 U/Ha	< 50 U/Ha
Tingkat Kelayakan Bangunan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Tingkat Penggunaan Lantai Luas Bangunan	< 4,5 m ² /Org	4,6-6,5 m ² /Org	6,6 – 8,5 m ² /Org	8,6 - 10,5 m ² /Org	10,5 M ² /Org
Tingkat Pelayanan Air Bersih	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Kondisi Sanitasi Lingkungan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Kondisi Persampahan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Kondisi Saluran Air Hujan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Kondisi Jalan	> 70 %	51 – 70 %	31 – 50 %	11 – 30 %	< 10 %
Besarnya Ruang Terbuka	< 2,5 %	2,5 – 5,0 %	5,0 – 7,5 %	7,5 – 10,0 %	< 10 %
Tingkat Kemiskinan	> 35 %	26 – 35 %	16 – 25 %	6 – 15 %	< 6 %
Tingkat Kepadatan	> 35 %	26 – 36 %	16 – 25 %	6 – 15 %	< 6 %
Tingkat Pendidikan	> 15 %	11 – 15 %	6 – 10 %	1 – 5 %	< 6 %
Tingkat Kerawanan Keamanan	> 6 Kali / Thn	5 – 6 Kali/Thn	3 – 4 Kali/Thn	1 – 3 Kali/Thn	0 Kali/Thn

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Standar Permukiman Kumuh, 2001

Alasan Pemilihan Lokasi Permukiman

Perlu juga dipahami bagaimana penduduk kota dan para migran dalam menentukan kawasan atau lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bermukim, diantaranya:

a) Preferensi Bermukim, menurut Willeam A.V Clark dan M. Cawallader memaparkan pendapatnya tentang preferensi bermukim bagi penduduk kota, "bahwa kriteria utama yang dipakai untuk menetapkan lingkungan bermukim adalah biaya, bentuk rumah, lokasi, kualitas fisik dan status sosial dan lingkungan itu. Faktor ini tidak sama nilainya dengan semua rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dapat membuat pilihan (golongan yang berpendapatan rendah), akan memilih perumahan murah yang tersedia dan mampu membayarnya, akan tetapi rumah tangga yang berpenghasilan tinggi akan mementingkan status sosial lingkungan bermukim yang dipilih dan juga memilih bentuk khusus rumah tempat tinggalnya tersebut.

b) Kondisi Lingkungan Permukiman, menurut Muth (1969) pelayanan perumahan merupakan fungsi dari kondisi lingkungan permukiman (rumah dan tanah permukiman). Artinya, semakin baik kualitas lingkungan permukiman maka semakin tinggi pula kepuasan seseorang untuk bermukim di kawasan tersebut. Selanjutnya, kondisi lingkungan permukiman ditentukan oleh kualitas rumah dan tanah permukiman.

c) Transportasi, merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, dengan kata lain preferensi bermukim sangat dipengaruhi oleh kemudahan transportasi daerah tersebut.

d) Lapangan Kerja, pertumbuhan lapangan kerja pada suatu tempat akan menarik jumlah penduduk, bahkan jumlah lapangan kerja dapat menarik pekerjaan dari luar kawasan atau para migran. Dengan demikian, definisi operasional lapangan kerja sebagai variabel adalah : a). Jarak tempat kerja dengan permukiman, b). Kenyamanan dalam mencapai tempat kerja, dan c). Biaya rata-rata komuting ke tempat kerja.

Pengolahan Lingkungan Permukiman

Istilah masalah lingkungan hidup atau permukiman (*environmental problem*)

oleh Soerjani dkk (1987), mulai ramai dibicarakan sejak timbulnya gerakan untuk kelestarian lingkungan di tahun 60-an di negara-negara maju. Pengelolaan lingkungan sendiri menurut Mustafa (2000) adalah merupakan suatu upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup yang didalamnya termasuk lingkungan permukiman. Dalam pengelolaan permukiman perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: a). Penyediaan ruang yang cukup pada lingkungan sehingga mampu mendukung kehidupan yang ada di atasnya, b). Pembangunan perumahan untuk kebutuhan permukiman harus sesuai dengan lingkungan terutama kapasitas tampung serta aspek sosial budaya masyarakat, c). Penataan dan pengaturan dengan baik, penyebaran penduduk dan pemukimannya sehingga serasi dengan lingkungan sekitarnya, dan d). Kegiatan jasa lainnya seperti pasar, rumah sakit, hotel, peternakan, dan lain-lain, dimana pengelolaannya harus dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Tujuan dari beberapa hal di atas adalah : a). Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, b). Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, c). Terwujudnya manusia sebagai pembangun lingkungan hidup, dan d). Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Penataan Permukiman Dan Tata Ruang

Kawasan permukiman berdasarkan konsep alokasi dan tata guna lahan rasional, harus terletak pada kawasan dengan sumber daya dukung lahan relatif datar dengan jenis tanah yang tahan erosi dan intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Suatu kawasan permukiman dikatakan layak, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Aman dari bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
2. Kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi penghuninya diantaranya :

a). Meningkatkan ketersediaan pemukiman dan mendayagunakan sarana dan prasarana pemukiman, b). Meningkatkan pembangunan lintas sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya, c). Tidak mengganggu fungsi lindung, d). Tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam, e). Meningkatkan pendapatan masyarakat, f). Menyediakan kesempatan kerja, dan g). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan kawasan permukiman ditujukan untuk dapat memanfaatkan ruang yang sesuai untuk bermukim dan menyediakan kondisi fisik lahan yang layak dan baik, seperti kondisi lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam (bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain) serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Persyaratan kelayakan suatu permukiman meliputi: a). Kawasan harus bebas dari masalah yakni dengan adanya dukungan dari penduduk setempat dan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lahan lain, b). Kawasan harus jelas dan pasti yakni tata letak, batas fisik kawasan jelas dan sudah dipetakan, dan c). Permukiman harus terletak dikawasan pertumbuhan dan harus dekat dengan tempat kerja dan usaha.

Pembangunan dan perkembangan permukiman yang ditujukan untuk mewujudkan suatu kawasan yang aman, serasi dan teratur, serta memenuhi criteria catur layak yaitu; layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungannya.

Peremajaan Kota

Peremajaan Kota (*Urban Renewal*) memiliki pengertian yang dapat dipahami sebagai upaya menata kembali suatu kawasan kota yang telah mengalami pemerosotan nilai atau tidak lagi sesuai dengan fungsinya dan mempunyai prinsip untuk memberikan prioritas dan bantuan sepenuhnya kepada penghuni lama (Afandi, 1987).

Pada awalnya program peremajaan kota dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan sekarang ini, yaitu tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi pada penghuni lama pada kawasan tersebut. Oleh karena itu dilakukan

pendekatan-pendekatan dengan cara yang baru yaitu dengan membangun tanpa menggusur dan ketentuan ini diatur dalam Inpres No.5 Tahun 1990 tentang peremajaan permukiman kumuh yang terletak diatas tanah negara, yang pada prinsipnya mengatur pembangunan ulang permukiman yang lebih baik, nyaman dan sehat pada kawasan kumuh tersebut dan akan kembali diberikan kepada masyarakat yang tadinya bermukim disana. Adapun penjelasan mengenai prinsip penggunaan metode ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh penduduk pada kawasan kumuh ditampung kembali dikawasan semula, dengan cara membangun rumah susun untuk mengurangi kepadatan kawasan.
2. Karena penduduk pada kawasan kumuh itu biasanya berpendapatan rendah dan tidak akan sanggup membayar biaya pembangunan maka harus diadakan prinsip subsidi, yang artinya tidak semua biaya pembangunan dibebankan kepada mereka.
3. Sebagian dari tanah eks kawasan kumuh akan diberikan kepada pihak swasta untuk membangun bangunan komersial, dan hasilnya digunakan untuk dana subsidi bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.
4. Oleh karena biasanya dana dari tanah sisa itu juga tidak cukup untuk subsidi maka pemerintah diharapkan untuk turun tangan membangun sarana dan prasarana.

Dalam proses peremajaan suatu kota, dapat digunakan beberapa cara pendekatan atau metode perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi atau sifat permasalahan yang dihadapi pada kawasan tersebut.

Adapun cara pendekatan atau metode perencanaan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah :

a) Pembangunan Kembali (*Redevelopment*) atau peremajaan menyeluruh, yakni upaya penataan kembali suatu kawasan kota dengan terlebih dahulu melakukan pembakaran sarana atau prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan kota tersebut.

b) Gentrifikasi (*Urban infill*), yakni upaya peningkatan vitalitas suatu kawasan kota melalui upaya peningkatan kualitas lingkungannya tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan tersebut.

c) Konservasi, yakni upaya untuk memelihara suatu tempat (lahan, kawasan, gedung atau kelompok gedung beserta lingkungannya) sedemikian rupa sehingga makna (arti sejarah, budaya tradisi, ekologi dan sebagainya) dari tempat tersebut dapat dipertahankan.

d) Rehabilitasi, yakni upaya untuk mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Bentuk kegiatan ini banyak dipakai dalam proses gentrifikasi dan konservasi.

e) Preservasi, yakni upaya memelihara dan melestarikan monumen, bangunan atau lingkungan pada kondisinya dan mencegah proses terjadinya kerusakan.

f) Renovasi, yakni upaya untuk mengubah sebagian atau beberapa bagian dari bangunan atau kompleks tua dengan tujuan agar bangunan/kompleks tersebut dapat diadaptasi untuk menampung fungsi baru ataupun fungsi yang sama dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai kebutuhan baru/modern. Upaya ini biasanya menyertai upaya konservasi dan gentrifikasi suatu bangunan atau lingkungan.

g) Restorasi, yakni upaya menghilangkan tambahan-tambahan yang timbul kemudian, serta memasang/mengembalikan unsur-unsur semula yang telah hilang.

h) Rekonstruksi, yakni upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat yang rusak parah telah hilang, sedekat mungkin dengan wujud semula yang diketahui.

Peremajaan kota dapat diklasifikasikan dengan kategori yang didasarkan pada penggolongan bobot, yaitu tingkat, sifat, dan skala dari perubahan yang terjadi didalam proses permajaan yaitu; kategori 1 tingkat perubahan kecil/preservasi, kategori 2 tingkat perubahan sedang/rehabilitasi dan kategori 3 tingkat perubahan besar/redevelopment.

Ada 5 (lima) hal faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian guna tertibnya pembangunan permukiman, yaitu:

1) Alam, antara lain menyangkut tentang; Pola tata guna tanah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan, tanaman, area rekreasi/olah raga.

2) Manusia, antara lain menyangkut tentang; Pemenuhan kebutuhan fisik/fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan, tata nilai, estetika.

3) Masyarakat, antara lain menyangkut tentang; Partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek sosial ekonomi, kependudukan.

4) Wadah atau Sarana kegiatan; antara lain menyangkut tentang Perumahan, Pelayanan Umum, seperti (Puskesmas dan Sekolah), fasilitas umum, seperti (toko, pasar, gedung pertemuan).

5) Jaringan Prasarana; antara lain menyangkut tentang: Utilitas (air bersih, listrik, drainase dan persampahan, transportasi, komunikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kab. Kepulauan Yapen

Secara administrasi, Kampung Ansus (I dan II) merupakan bagian dari wilayah Distrik Yapen Barat. Berdasarkan data dari BPS, Kampung Ansus dan Kampung Wimoni tergolong ke dalam topografi lembah/DAS. Topografinya relatif landai karena memiliki tingkat keterlereng tanah 0-8%. Keadaan topografi yang demikian ini sangat ideal untuk peruntukan berbagai macam fungsi pembangunan, akan tetapi perlu ada penyesuaian dengan arah kemiringan dan kontrol drainase untuk mencegah erosi.

Penggunaan lahan yang terdapat di Kota Distrik Yapen Barat dibagi menjadi dua jenis yaitu Kawasan tak terbangun

yang terdiri dari hutan, semak-semak dan kebun hasil konversi lahan hutan serta kawasan terbangun yang terdiri dari : a). Bangunan Fasilitas Pemukiman (laut/nelayan dan darat), b). Bangunan Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA), c). Bangunan Fasilitas Peribadatan (Gereja), d). Bangunan Fasilitas Perdagangan (Pasar, Grosir Minyak dan Kios), e). Bangunan Fasilitas Perkantoran (Kantor Distrik, Polsek, Koramil, Kantor P dan P, kantorkehutanan), f). Bangunan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pos Malaria), g). Bangunan Fasilitas RTH (Makam), dan h). Bangunan Pelabuhan

Selain fasilitas yang ada diatas juga terdapat beberapa infrastruktur Kota berupa jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik (tidak berfungsi) jaringan penerangan (Genset) dan beberapa saluran drainase.

Pola Persebaran

Pola persebaran kawasan terbangun yang terdapat pada Kota Distrik Yapen Barat dibagi menjadi dua yaitu Kawasan terbangun yang terdapat di Laut berupa perumahan nelayan dan jembatan/jalan diatas laut serta kawasan terbangun yang ada di darat yang berupa fasilitas permukiman dan fasilitas umum).

Adapun distribusi fasilitas umum banyak terdapat pada Kampung Ansus II dan untuk persebaran fasilitas permukiman terdistribusi pada Kampung Wimoni/Ansus I dan Kampung Ansus II. Selain itu juga terdapat beberapa lokasi aglomerasi kawasan permukiman pada beberapa titik, diantaranya pada Teluk di Kampung Ansus II dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi serta pada beberapa titik blok pemukiman yang tersebar merata pada wilayah Kota.

Pola Perkembangan

Pola perkembangan kawasan terbangun yang terdapat pada Kota Distrik Yapen Barat berada di dalam teluk, dengan pola perkembangan kawasan terbangunnya berkembang secara organis dan linier dengan garis pantai/jaringan jalan. Adapun pola jaringan jalan yang menjadi frame perkembangan kawasan terbangun di Kota Distrik Yapen Barat berpola linier dengan garis pantai, sehingga pemukiman darat yang terbentuk masih berada di pinggir pantai dengan radius maksimal ± 200 m.

Intensitas Bangunan

Intensitas bangunan merupakan salah satu ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Variabel intensitas bangunan ini diantaranya adalah kondisi bangunan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan kerapatan bangunan. Penjelasan lebih rinci mengenai intensitas bangunan pada masing-masing distrik dapat dilihat pada pembahasan berikut.

Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan yang ada di Kota Distrik Yapen Barat dapat diklasifikasikan atas kondisinya sebagai berikut :

- Bangunan dengan kondisi baik yaitu : pada bangunan fasilitas umum dan beberapa fasilitas perumahan Dinas yang banyak terdapat di Kampung Ansus II, dimana bangunan tersebut sudah permanen (dari tembok/semen)
- Bangunan dengan kondisi sedang, yaitu pada beberapa bangunan rumah penduduk yang mayoritas ada di darat, dengan pondasi semi permanen (semen/tembok dan papan). Persebaran fasilitas dengan kondisi bangunan sedang/semi permanen ini tersebar pada perumahan darat yang ada di Kampung Ansus II dan Kampung Ansus I/Wimoni
- Bangunan dengan kondisi kurang baik, yaitu pada tiap rumah penduduk yang berada di atas air (rumah nelayan) rumah panggung ciri bangunan rumah dari papan. Selain itu bangunan rumah panggung juga rentan roboh, untuk itu perlu mengganti pondasi secara berkala agar kayu yang dipakai penyangga tidak roboh. Persebaran fasilitas dengan kondisi bangunan buruk/non permanen ini tersebar pada perumahan diatas air/nelayan yang ada di Kampung Ansus II dan Kampung Ansus I/Wimoni.

Kondisi Dan Karakteristik Sosial, Budaya Dan Ekonomi Penduduk

Jumlah dan Distribusi Penduduk

Berdasarkan Buku Distrik Yapen Barat dalam Angka Tahun 2010, dan survey dilapangan jumlah penduduk Kota Distrik Yapen Barat 7.216 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.790 jiwa dan perempuan 3.426 jiwa yang tersebar di Kampung Ansus II dan

Kampung Ansus I/Wimoni. Dari kedua kampung yang merupakan wilayah Kota Distrik Yapen Barat tersebut, konsentrasi persebaran penduduk terbesar berada di Kampung Ansus yang mencapai 2.810 jiwa atau sekitar 38,94 % dari total penduduk Kota.

• Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk dengan luas wilayah keseluruhan pada satu wilayah. Adapun kepadatan penduduk Kampung Ansus pada tahun 2010 adalah 131 Jiwa/Km². Pada tahun 2010 lebih padat kampung Ansus dan merupakan yang terpadat di Distrik Yapen Barat.

• Pertumbuhan Penduduk

Jika kita lihat dari data yang didapat mengenai tingkat pertumbuhan penduduk yang terdapat di Kota Distrik Yapen Barat pola pertumbuhannya cenderung linier, dimana pertumbuhan rata-rata mencapai 2 %. Untuk pertumbuhan penduduk di Kampung Ansus II mencapai 2,08 % dan pertumbuhan penduduk di Kampung Wimoni/Ansus I mencapai 1,92 %

• Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data profil penduduk Kepulauan Yapen Tahun 2010, Distrik Yapen Barat merupakan distrik yang penduduknya paling banyak tidak sekolah atau belum tamat sekolah.

Tingkat pendidikan disuatu daerah dapat dikaitkan dengan tingkat sumber daya manusia.

Tabel 2., Penduduk Yapen Barat Menurut Desa/Kampung dan Tingkat pendidikan (2010)

Desa/Kampung	Tidak/belum sekolah	Tidak Tamat		
		SD	SLT P	SLTA
Miosnum	44	18	51	3
Woinap	178	325	161	14
Kanaki	69	73	45	5
Dumani	272	195	133	17
Wooi	243	264	165	15
Aibondeni	274	112	56	13
Webi	490	236	119	31
Warabori	193	43	81	12
Wimoni	764	335	150	40
Ansus	1162	392	280	123
Natabui	161	92	73	12
Papuma	454	357	154	36
Kairawi	314	167	143	13
Sasawa	37	74	28	9
Yapen Barat	4655	2683	1639	343

Sumber :Hasil Survey, Januari 2010

Dalam tabel di atas terlihat bahwa Kampung yang penduduknya paling banyak tidak sekolah adalah Kampung Ansus, kemudian disusul oleh Kampung Wimoni. Begitu pula dengan banyaknya penduduk yang telah tamat SLTA, Kampung Ansus dan Wimoni merupakan Kampung yang penduduknya terbanyak lulus SLTA.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu sektor formal dan sektor informal. Jumlah penduduk di Kota Distrik Yapen Barat yang bekerja pada sektor formal jumlahnya masih sangat minim sekali. Adapun jenis mata pencaharian penduduk di Kota Distrik Yapen Barat pada sektor formal hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jenis mata pencaharian penduduk di Kota Distrik Yapen Barat rata-rata bekerja pada sektor informal, yaitu sebagai petani dan nelayan serta sebagian pengrajin perahu kayu.

Untuk Daerah Ansus I (Wimoni) dan Ansus II (Ansus) mata pencaharian yang dominan adalah sebagai nelayan, hal tersebut terjadi karena luas Kampung Ansus dan Kampung Wimoni dominasinya adalah wilayah perairan bukan daratan dan pegunungan, sehingga hampir seluruh warganya bekerja sebagai nelayan.

Tabel 3. Penduduk Yapen Barat Menurut Desa/Kampung dan Sektor Pekerjaan Tahun 2010

Desa/Kampung	Tidak Bekerja	Pertanian	Industri	Jasa-jasa	Lainnya
Miosnum	75	41	-	-	-
Woinap	358	293	-	7	20
Kanaki	98	47	28	6	13
Dumani	253	280	1	11	72
Wooi	307	318	-	12	50
Aibondeni	206	204	-	3	42
Webi	400	396	1	15	64
Warabori	135	142	-	10	42
Wimoni	467	644	1	31	146
Ansus	989	744	10	67	147
Natabui	134	144	-	5	55
Papuma	459	447	-	20	75
Kairawi	317	271	-	9	40
Sasawa	77	53	-	5	13
Yapen Barat	4275	4024	41	201	779

Sumber : Hasil Survey, 2010

Kondisi Dan Karakteristik Infrastruktur

Di Kampung Ansus tidak terdapat saluran drainase dan saluran air limbah yang memadai. Untuk air bersih, pada kampung ini air bersih belum tersedia di setiap rumah tangga, tetapi hanya terdapat air bersih berupa penyediaan kran umum.



Gambar 2. Fasilitas air Bersih Di Kampung Ansus

Sumber : Hasil Survey, 2010

SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH

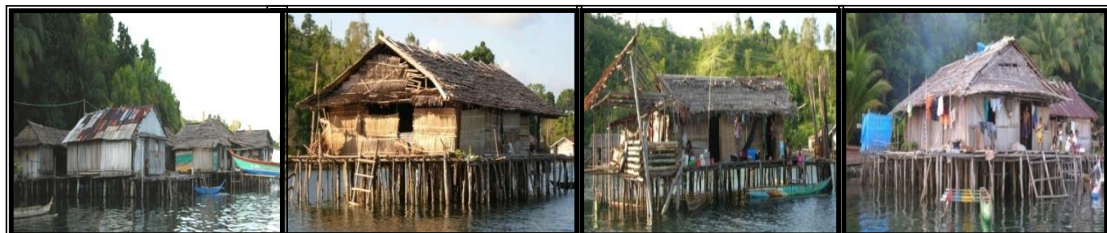
Sistem pembuangan sampah yang ada di Kampung Ansus masih menggunakan

sistem pembuangan tradisional yang hanya membuang sampah di sekitar rumah (tidak menimbun ataupun tidak dialirkan ke Tempat Pembuangan sampah Sementara kemudian ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir).

Kondisi Dan Karakteristik Tata Bangunan

a. Kondisi Perumahan

Kondisi Perumahan yang ada di Kampung Ansus dan Kampung Wimoni yang berada di atas lautan adalah terbuat dari bangunan non Permanen. Rumah – rumah yang ada terbuat dari kayu – kayu. Bangunan permanen rata- rata adalah fasilitas umum berupa gereja, sekolah, dan sarana kesehatan yang berada di atas daratan. Untuk bangunan pasar yang ada di Kampung Wimoni merupakan bangunan semi permanen. Kualitas Bangunan yang ada di Kampung Ansus relatif buruk karena tidak memenuhi syarat sebagai rumah sehat. Bangunan rumah – rumah yang ada di atas laut terdiri dari kayu atau daun-daun. Atap terditi dari daun atau pun seng.



Gambar 3. Perumahan di Kampung Ansus

Sumber : Hasil Survey, 2011

2. ANALISA

Identifikasi Kawasan

Pada dasarnya tujuan dilakukannya pengidentifikasian terhadap kawasan permukiman adalah untuk mengetahui karakteristik kawasan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan elemen fisik permukiman pada Kampung Ansus. Identifikasi kawasan permukiman pada Kampung Ansus dilakukan melalui cara sebagai berikut:

➤ Perumusan Kriteria Dan Tolak Ukur Permukiman

Perumusan tolak ukur dari persepsi penduduk akan menjadi bagian untuk mengetahui penilaian penduduk tentang kondisi permukiman yang dihuni dan ditempatinya. Secara makro persyaratan tersebut menjadi tolak ukur dalam memilih suatu lokasi permukiman. Dari kajian

terhadap lokasi permukiman di Kampung Ansus bahwa perubahan dan perkembangan yang dialami kawasan ini dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas yang tinggi, oleh adanya aksesibilitas tersebut maka terjadi interaksi langsung dengan pusat kota dan kawasan sekitarnya.

Perumusan tolak ukur permukiman dirumuskan dari persepsi penduduk melalui penyebaran kuisioner, dan untuk menghitung besarnya presentase penilaian penduduk terhadap permukiman digunakan rumus (hasilnya Tabel 4).

$$\frac{X}{n} \times 100\%$$

Keterangan : X= Kategori Persepsi Penduduk, n = Jumlah sampel pada unit permukiman.

Tabel 4. Penilaian Penduduk Terhadap Kondisi Permukiman Kampung Ansus

Unit Lingkungan Permukiman	Persepsi Penduduk			Jumlah	Persentase (%)		
	Baik	Sedang	Buruk		Baik	Sedang	Buruk
RW I	3	2	5	10	30	20	50
RW II	4	5	5	14	28,57	35,71	35,71
RW III	5	4	2	11	45,45	36,36	18,18
RW IV	6	4	6	15	40	26,66	40
RW V	4	5	5	15	26,66	33,34	33,34
RW VI	3	2	5	10	30	20	50
Total	25	18	28	75	33,44	28,67	32,87

Sumber: Hasil Analisa & Survey Lapangan 2012

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa persepsi penduduk terhadap kondisi permukiman yang terdapat pada Kampung Ansus sebanyak 75 responden diantaranya menilai, 33 responden (33,44%) menilai bahwa kondisi permukiman baik, 28 responden (28,67%) menilai bahwa kondisi permukiman sedang, dan 32 responden (32,87%) menilai bahwa permukiman memiliki kondisi buruk. Adapun alasan penduduk yang memberikan penilaian terhadap permukiman dalam kondisi buruk memiliki alasan sebagai berikut: a). Dikarenakan bangunan yang ada kurang teratur dan tertata dengan baik, b). Bangunan yang telah dibangun tidak berdiri tegak namun mengalami kemiringan akibat bangunan rumah tersebut di bangun diatas air, dan c). Lingkungan yang kotor akibat sampah penduduk.

Sedangkan responden yang memberikan penilaian permukiman pada Kampung Ansus dalam kondisi baik, memiliki alasan sebagai berikut: a). Mempunyai akses terdekat dengan tempat kerja, b). Kebutuhan air bersih lancar, c). Tempatnya aman, dan d). Memiliki jalan yang memadai.

Tolak ukur lainnya yang digunakan dalam mengukur pengembangan permukiman di Kampung Ansus adalah mengenai penilaian penduduk terhadap kelayakan kondisi permukiman sekarang. Maka berdasarkan hasil survey diketahui bahwa 60,68% penduduk menyatakan bahwa kondisi permukiman perlu ditata, dan 32,87% menyatakan bahwa kondisi permukiman tidak perlu untuk ditata.

Tabel 5. Penilaian Penduduk Terhadap Kelayakan Kondisi Permukiman

Unit Lingkungan Permukiman	Persepsi Penduduk		Jumlah	Presentase %	
	Perlu Ditata	Tidak Perlu		Perlu Ditata	Tidak Perlu
RW I	8	5	13	61,53	38,46
RW II	7	6	13	53,84	46,15
RW III	6	5	11	54,54	45,45
RW IV	9	5	13	69,23	30,76
RW V	8	4	12	66,66	33,33
RW VI	7	6	13	58,33	46,15
Total	43	29	75	60,68	32,87

Sumber: Hasil Analisa& Survey Lapangan 2012

Lokasi permukiman menjadi salah satu faktor bagi penduduk dalam mengembangkan kemampuan dan jati dirinya. Faktor lokasi juga dapat mempengaruhi adanya konsentrasi penduduk. Penduduk dalam memilih lokasi permukiman di Kampung Ansus sebagai faktor pertimbangannya adalah kenyamanan, lokasi strategis, dekat

dengan tempat kerja dan peluang untuk berusaha. Dari 75 responden terdapat 27 responden (36%) menjawab lokasi permukiman dekat dengan tempat kerja, 33 responden (44%) menjawab lokasi permukiman strategis, dan 15 responden (20%) menjawab lokasi permukiman nyaman (Tabel 6)

Tabel 6. Persepsi Bermukim

Unit Permukiman	Alasan Pemilihan Lokasi Bermukim	Jumlah Responden	Presentase
RW I	- Lokasi strategis	5	50
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	3	30
	- Tempat aman	2	20
	Jumlah	10	
RW II	- Lokasi strategis	6	46,15
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	4	30,76
	- Tempat aman	3	23,07
	Jumlah	13	
RW III	- Lokasi strategis	5	33,33
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	7	46,66
	- Tempat aman	3	20
	Jumlah	15	
RW IV	- Lokasi strategis	6	46,15
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	5	38,46
	- Tempat aman	2	15,38
	Jumlah	13	
RW V	- Lokasi strategis	7	53,84
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	2	15,38
	- Tempat aman	3	23,07
	Jumlah	12	
RW VI	- Lokasi strategis	4	30,76
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	6	46,15
	- Tempat aman	2	15,38
	Jumlah	12	
Jumlah Total	- Lokasi strategis	33	44
	- Tanah murah	-	-
	- Dekat tempat kerja	27	36
	- Tempat aman	15	20
	Jumlah	75	100

Sumber Data: Hasil Analisa& Survey Lapangan 2011

➤ Zonasi Lahan

Menurut pengertiannya zonasi lahan dapat diartikan sebagai pengelompokan lahan sejenis dalam suatu wilayah yang homogen/ memiliki kesamaan, dengan tujuan agar lahan-lahan yang ada dalam kawasan atau wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ciri atau karakter yang dimilikinya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka

area atau unit lahan yang ada perlu diberikan batasan berdasarkan karakter, fungsi dan potensi yang ada.

Zonasi lahan pada Permukiman Kampung Ansus dilakukan dengan menggunakan standar pengklasifikasian indikator permukiman. Indikator-indikator tersebut antara lain;

a. Tingkat Kepadatan Penduduk

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk maka beberapa kawasan permukiman memiliki kategori penilaian yang berbeda, kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada RW V (280 jiwa/ha) dan RW IV (195 jiwa/ha). Jika dilakukan cros chek dengan klasifikasi

indikator permukiman kumuh, maka keseluruhan dari Kampung Ansus dikategorikan kedalam permukiman yang masih memiliki prioritas dalam pengembangan perumahan dan permukiman (Tabel 7)

Tabel 7. Kepadatan Penduduk / RW Pada Kampung Ansus

Unit permukiman	Jumlah Penduduk (jiwa)					Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (jiwa/Ha)				
	2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010
RW I	205	218	231	264	277	3,11	65	70	74	84	89
RW II	274	307	340	373	406	3,30	83	93	103	113	123
RW III	319	352	385	418	451	2,35	135	149	163	177	191
RW IV	654	687	720	753	786	4,03	162	170	178	186	195
RW V	238	271	304	317	350	1,25	190	216	243	253	280
RW VI	117	250	283	305	320	2,10	84	119	134	145	152
Jumlah	1.807	2.085	2.263	2.430	2.590	16,14	719	817	895	898	1.030

Sumber : Data Hasil Analisa & Survey Lapangan 2012

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Zonasi lahan berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk dengan ketentuan pertumbuhan penduduk $> 2,5\%$ dikategorikan sangat kumuh. Dari ketentuan tersebut unit permukiman yang dikategorikan sangat kumuh terdapat pada RW IV dan III. Kategori kumuh berat terdapat pada RW VI. Kategori kumuh sedang terdapat pada RW I.

c. Kualitas Bangunan

Penilaian terhadap kualitas bangunan yang dimaksud adalah kondisi dari suatu bangunan dalam memberi jaminan kenyamanan bagi penghuninya,

penilaian yang dilakukan terhadap kondisi dan kualitas bangunan hunian di Kampung Ansus dapat diklasifikasikan dengan cara mengkondisikan bangunan menurut pengklasifikasian secara baik, sedang, dan buruk.

Dari hasil perhitungan tersebut jika dilakukan zonasi kawasan maka, permukiman Kampung Ansus digolongkan dalam permukiman kumuh berat. Sedangkan jika ditinjau secara mikro maka, unit permukiman RW VI merupakan kawasan permukiman kumuh sedang dengan besarnya persentase kondisi bangunan buruk mencapai 24,04 %.

Tabel 8. Penilaian Kondisi Kualitas Bangunan Pada Kampung Ansus

Unit Lingkungan Permukiman	Kondisi Bangunan			Jumlah	Persentase %		
	Baik	Sedang	Buruk		Baik	Sedang	Buruk
RW I	135	7	3	145	93,10	4,82	2,06
RW II	75	2	1	78	96,15	2,56	1,28
RW III	50	3	1	53	94,33	5,66	1,88
RW IV	152	2	1	155	98,06	1,29	0,64
RW V	97	6	3	106	91,50	5,66	2,83
RW VI	183	35	69	287	63,76	18,46	24,04
Jumlah	692	55	78	824	89,48	6,40	5,45

Sumber: Hasil Analisa & Survey Lapangan 2012

➤ KEPADATAN BANGUNAN

Pada dasarnya perhitungan terhadap tingkat kepadatan bangunan adalah untuk mengetahui perbandingan antara banyaknya bangunan hunian dengan lahan

yang tersedia. Menurut perhitungan yang dilakukan, tingkat kepadatan bangunan hunian permukiman secara makro pada lokasi studi adalah sebanyak 824 unit/ha (51%) dan kepadatan bangunan tertinggi

jika dilihat menurut ruang lingkup mikronya terdapat pada RW VI yang mencapai 136 unit/ha.

Tabel 9. Kepadatan Bangunan di Kampung Ansus

Unit Permukiman	Jumlah Bangunan (Unit)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)
RW I	145	3,11	46
RW II	78	3,30	23
RW III	53	2,35	22
RW IV	155	4,03	38
RW V	106	1,25	84
RW VI	287	2,10	136
Jumlah	824	16,14	349

Sumber Data: Hasil Analisa & Survey Lapangan 2012

➤ Kondisi Sanitasi Lingkungan

Dari ketentuan besaran indikator permukiman, jika dilakukan perbandingan terhadap fasilitas pengelolaan limbah rumah tangga pada RW VI Kampung Ansus maka secara keseluruhan belum tersedia, hal ini berarti kawasan unit permukiman pada Kampung Ansus di kategorikan kedalam kawasan kumuh berat, kumuh berat ini berdasarkan pengamatan secara langsung pada kondisi permukiman.

➤ Kondisi Persampahan

Zonasi lahan berdasarkan penilaian ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, ditetapkan jika > 70% sarana pengelolaan sampah tidak tersedia maka dikategorikan sebagai permukiman sangat kumuh. Penilaian tersebut jika ditinjau pada aspek pelayanan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah terhadap kawasan permukiman di Kampung Ansus dapat

dijelaskan bahwa pada umumnya unit-unit permukiman kurang diwadahi atau kurang memadai akansarana pengelolaan sampah. Maka sesuai dengan indikator penilaian kawasan permukiman dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh sedang.

HASIL PENILAIAN TERHADAP ZONASI LAHAN

Dari hasil identifikasi terhadap indikator-indikator yang berfungsi untuk zonasi lahan atau pun kawasan yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan penilaian terhadap pengklasifikasian permukiman pada RW VI Kampung Ansus perlu mendapatkan rehabilitasi terhadap kawasan permukiman pada tiap-tiap unit lingkungannya. Penilaian tiap aspek dalam kategori sangat kumuh, kumuh berat, kumuh sedang.

Tabel 10. Hasil Penilaian Terhadap Zonasi Lahan Berdasarkan Pengklasifikasian Permukiman Kumuh

Indikator Penilaian	Kategori Zonasi Lahan Terhadap Unit Lingkungan Permukiman					
	RW I	RW II	RW III	RW IV	RW V	RW VI
Kepadatan penduduk	xxx	x	x	xxx	x	xx
Pertumbuhan penduduk	xxx	x	x	xxx	x	xx
Kualitas bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Kepadatan bangunan	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx
Kondisi sanitasi	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xx
Kondisi persampahan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx

Sumber : Data Hasil Analisa, 2012

Keterangan :

x	=	Sangat Kumuh	xx	=	Kumuh Berat
xxx	=	Kumuh Sedang	xxxx	=	Kumuh Ringan
xxxxx	=	Tidak Kumuh			

ANALISA KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT

Aspek-aspek sosial yang terkandung pada masyarakat umumnya diukur dari pola dan tingkah laku hidup yang dimiliki oleh penduduk pada wilayah tersebut, biasanya pada permukiman perkotaan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi pemukiman. Kondisi tersebut berpengaruh bagi penduduk untuk mengaktualisasi diri, baik dalam bentuk pola bermukim baik yang memiliki nilai lingkungan maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat.

Pada Kampung Ansus terdapat suku yang memiliki bahasa yang samadengan suku yang lainnya. Hasil identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ada 2 suku asli Kampung Ansus sebagai pemilik hak ulayat yaitu : suku Wowdauw yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan suku Wondey dengan mata pencaharian nelayan dan berkebun. Disamping itu juga terdapat suku-suku pendatang dari luar Kampung Ansus seperti Suku Jawa, Suku Buton (*Sulawesi*) dan Suku Makasar (*Sulawesi*) yang bermukim di sekitar pasar ansus (wimoni) dengan mata pencaharian sebagai pedagang.

Suku-suku tersebut sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan luarnya, interaksi sosialnya tinggi, mudah menerima hal baru dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adat-istiadat mereka. Masing-masing berhimpun dalam satu ikatan adat (lembaga masyarakat adat) dengan sistem organisasi yang mengarah ke moderen.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat pada lokasi studi umumnya hidup berdampingan dan saling toleransi. Hal ini dapat ditunjukan apabila adanya pertemuan-pertemuan atau kegiatan di tingkat RT sampai kelurahan maka semua suku dapat berkumpul dan bermusyawarah.

Selain kondisi sosial yang telah dijabarkan diatas terdapat juga faktor lain yang dianggap penting dalam mengukur tingkat kemampuan penduduk, faktor tersebut adalah kondisi perekonomian masyarakat pada lokasi studi itu sendiri. Pada dasarnya aspek perekonomian atau tingkat pendapatan masyarakat juga diperlukan untuk

mendukung penilaian terhadap proses analisis dalam kawasan. Dari data hasil survey diperoleh kondisi perekonomian penduduk Kampung Ansus dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Tingkat I adalah penduduk yang berpenghasilan > Rp. 1.000.000,- ; Pada tingkatan penghasilan ini, umumnya penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, ABRI, POLRI dan Swasta (usaha warung/kios) dengan jumlah 425 jiwa atau 16%. Bangunan hunian yang dimiliki umumnya bangunan pribadi yang diperoleh dengan membangun sendiri. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a) PNS berjumlah 175 jiwa atau 41%
- b) ABRI berjumlah 130 jiwa atau 30%
- c) POLRI berjumlah 80 jiwa atau 18%
- d) Swasta berjumlah 40 jiwa atau 9%

2. Tingkat II adalah penduduk yang berpenghasilan antara Rp. 500.000 - Rp.1.000.000,- ; Pada tingkatan ini berada pada penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang yang berjumlah 210 jiwa atau 8% dari jumlah penduduk Kampung Ansus. Bangunan hunian yang dimiliki adalah milik pribadi.

3. Tingkat III adalah penduduk yang berpenghasilan antara < Rp. 500.000 ; Tingkatan ini adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai PKL, buruh dan nelayan yang berjumlah 1.525 jiwa atau 58%. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: a). PKL berjumlah 300 jiwa atau 19%, b). Buruh berjumlah 400 jiwa atau 26%, dan c). Nelayan berjumlah 825 jiwa atau 54%. Masyarakat pada tingkat ini umumnya yang mempunyai bangunan hunian yang sederhana dan tradisional. Dan pada tingkatan inilah terdapat permasalahan pada kondisi bangunan yang terdapat di sebagian besar kawasan Kampung Ansus dan berada diatas air laut.

Secara garis besar kondisi perekonomian masyarakat di Kampung Ansus lebih didominasi oleh pekerja pada sektor informal (petani, buruh, pekerja di warung makanan, kios, ojek dan pekerja bangunan) dengan presentase 1.525 jiwa atau 58% dari jumlah penduduk Kampung Ansus. Pada dasarnya pertumbuhan sektor informal dengan presentase 1.065 jiwa atau 41% pada lokasi studi bersumber pada migrasi penduduk dari luar untuk memperoleh penghidupan dan penghasilan yang layak. Hal ini lebih diakibatkan karena

tingkat kebutuhan akan pekerjaan dimana mereka tinggal, sudah terbatas. Adapun kegiatan profesi yang lainnya yang juga terdapat pada lokasi studi adalah PNS, TNI-POLRI dan wirasawasta.

Melalui penjabaran terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diatas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kondisi kawasan permukiman pada lokasi studi, diantaranya adalah :

a. Adanya faktor nilai budaya yang masih terkandung pada sebagian besar masyarakat yang juga menjadi faktor utama dalam menentukan atau memilih lokasi untuk bermukim. Sebagai contoh, umumnya masyarakat pendatan dari luar Papua (Makasar, Jawa, dll) secara eksklusif lebih memilih daerah pinggiran pasar Wimoni (Ansus) sebagai tempat tinggal dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini lebih disebabkan karena masyarakat tersebut kebanyakan adalah pedagang dan wirausaha, dan memanfaatkan pasar sebagai lahan dalam mata pencaharian sehari-hari.

b. Adanya faktor pendorong seperti fasilitas perekonomian, perkantoran dan jasa serta fasilitas penunjang lainnya yang juga ikut andil dalam penentuan lokasi bermukim. Akibatnya, terlihat adanya pemanfaatan ruang atau lahan yang tumbuh secara spontan pada kawasan tersebut yang oleh masyarakat guna memperoleh akses pada kawasan tersebut..

c. Tingkat kebutuhan akan lahan pekerjaan dan memperoleh penghidupan dan penghasilan serta kemudahan akses ke tempat bekerja juga menjadi salah satu faktor penentunya.

d. Umumnya pada lokasi studi lebih didominasi oleh para pekerja di sektor

formal, yang mana dalam pemenuhan akan sarana perumahan dan bermukimnya lebih kepada rumah nelayan atau biasa disebut dengan rumah panggung (*rumah diatas air laut*) yang pengadaannya dilakukan oleh masyarakat setempat secara swadaya.

ANALISA PEMBOBOTAN

Tujuandari pembobotan adalah untuk mengidentifikasi bentuk peremajaan kawasan yang sesuai dengan kompleksitas masalah pada lokasi studi. Sebelum melakukan analisa pembobotan perlu dilakukannya pengidentifikasian terhadap permasalahan yang terdapat pada tiap-tiap unit permukiman, sehingga dapat diketahui kompleksitas dan kuantitas suatu permasalahan yang timbul pada unit-unit permukiman tersebut.

Permukiman pada Kelurahan Ansus memiliki unit permukiman yang pada umumnya terletak pada area dataran pantai dan medan bergelombang dengan tingkat kemiringan yang mencapai 0 - 30 %. Adapun kesamaan karakter fisik yang dimiliki pada tiap-tiap unit lingkungan permukiman pada Kelurahan Ansus dapat dilihat dari kondisi permukiman yang ada, seperti kurang tersedianya prasarana permukiman dan kondisi fisik lingkungan permukiman yang kotor dan buruk berada diatas air (*rumah panggung*). Gambaran tersebut memberikan penilaian bahwa kawasan pemukiman ini tergolong pada pemukiman yang perlu untuk diidentifikasi secara detail. Namun pada studi ini, yang hanya merupakan kajian tentang penataan pemukiman maka dilakukan identifikasi untuk mengetahui beberapa permasalahan yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kawasan. Untuk identifikasi masalah dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Identifikasi Permasalahan Permukiman Pada Kelurahan Ansur

No	Aspek Permukiman	Identifikasi Permasalahan	Unit-unit Permukiman					
			RW I	RW II	RW III	RW IV	RW V	RW VI
1.	Kondisi dan Keadaan Penduduk	Kosentrasi jumlah penduduk yang tinggi		√	√	√	√	√
		Tingkat kesadaran penduduk yang rendah	√	√	√	√	√	√
		Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah	√	√	√	√	√	√
2.	Kebutuhan Prasarana Permukiman	Tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah	√	√	√	√	√	√
		Pendistribusian air bersih	√	√				
		Kondisi drainase yang buruk	√	√				
		Kondisi jalan lingkungan yang mengalami penyempitan			√	√	√	√
3.	Kondisi dan Tata Letak Bangunan Perumahan	Tidak terdapat jarak antar bangunan			√	√	√	√
		Peluang terjadi kebakaran		√	√	√	√	√
		Kondisi bangunan hunian yang buruk			√	√		√
		Tidak memenuhi standarisasi perumahan			√	√	√	√
4.	Kondisi Fisik Lingkungan	Tingkat kemiringan lereng yang mencapai 16 – 30%	√	√				
		Terjadinya penurunan kualitas kawasan permukiman			√	√	√	√
Jumlah Permasalahan			6	8	10	10	9	10

Sumber: Hasil Analisa & Survey lapangan 2012

Pembobotan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap kondisi permukiman, dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Y = \frac{X}{XL} \times 100 \%$$

Keterangan : X=Jumlah Masalah, XL=Presentase Masalah (total masalah).

Adapun pengisian matriks pembobotan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Kolom (I) diisi dengan nomor urut untuk unit permukiman, b). Kolom (II) diisi dengan nama-nama unit lingkungan permukiman pada daerah yang diteliti, c). Pada kolom (III), (IV), (V) dan (VI) adalah pengisian angka sesuai dengan jumlah masalah yang ada pada lokasi studi. Dalam kolom ini pengisian dilakukan dengan dua bagian; pertama, sisi kolom sebelah kiri diisi

dengan jumlah permasalahan (X); kedua, pada sisi sebelah kanan kolom diisi dengan angka persentase (Y) yang diperoleh dengan menggunakan rumus diatas, d). Selanjutnya kolom indeks (VII) diisi dengan jumlah persentase dari masing-masing baris seluruh permasalahan yang ada, e). Kolom skor (IX) menunjukkan frekuensi masalah yang tinggi, dan begitupula sebaliknya, f). Nilai rata-rata dari penjumlahan persentase dari masing-masing baris dapat pula dilakukan dengan membagi hasil penjumlahan tersebut dengan kolom terkait dalam baris., dan g). Menentukan nilai range, yaitu :

Nilai Range=Indeks Tertinggi–Indeks Terendah. Hasil analisa pembobotan aspek permasalahan permukiman pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Analisa Pembobotan Aspek Permasalahan Permukiman Pada Kelurahan Ansus

No	Unit Lingkungan Permukiman	Aspek Permasalahan Unit-unit Permukiman Kelurahan Bhayangkara								Jumlah	Indeks	Score
		Kondisi dan Keadaan Penduduk		Kebutuhan Prasarana Permukiman		Kondisi dan Tata letak Bangunan Perumahan		Kondisi Fisik Lingkungan				
I	II	III		IV		V		VI		VII	VIII	IX
1	RW 01	2	11,8	3	21,4	0	0	1	16,7	49,9	12,47	I
2	RW 02	3	17,7	3	21,4	1	6,25	1	16,7	62,05	15,51	II
3	RW 03	3	17,7	2	14,2	4	25	1	16,7	73,6	18,4	III
4	RW04	3	17,7	2	14,2	4	25	1	16,7	73,6	18,4	III
5	RW05	3	17,7	2	14,2	3	18,7	1	16,7	67,3	16,82	II
6	RW06	3	17,7	2	14,2	4	25	1	16,7	73,6	18,4	III
Jumlah		17	100	14	100	16	100	6	100	400	100	

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Berdasarkan tabel pembobotan tersebut, dapat dijelaskan bahwa penentuan skala penanganan pada unit-unit lingkungan permukiman Kelurahan Ansus didasarkan atas Kriteria penilaian terhadap indeks atau nilai dari permasalahan pada tiap unit-unit lingkungannya. Adapun mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Nilai 1 – 10 = I(perubahan skala kecil)
- Nilai 11 – 20 = II(perubahan skala sedang)
- Nilai 21 – 30 = III(perubahan skala besar)

Dari hasil tabel pembobotan dan penentuan nilai score untuk tingkat penanganan permasalahannya yang dijabarkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hampir seluruh unit permukiman pada lokasi studi dikategorikan pada tingkat perubahan secara skala sedang dan besar, kecuali RW I.
- Untuk penataan unit permukiman yang termasuk dalam kategori perubahan secara skala besar, dilakukan peremajaan dalam bentuk redevelopment.
- Bagi penataan unit permukiman dengan skala penanganan pada tingkat perubahan kecil dan sedang, yaitu dengan melakukan peremajaan dalam bentuk rehabilitasi.

Permukiman RW 02 dan RW 05 berada pada tingkat perubahan skala sedang sehingga bentuk permukiman yang dipilih adalah rehabilitasi, sedangkan pada RW 03, 04 dan 06 berada pada tingkat perubahan skala besar sehingga bentuk penataan permukiman yang dipilih adalah redevelopment.

Hasil Analisa Penataan Permukiman Kampung Ansus Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman

Kawasan permukiman yang sudah ada di Kampung Ansus termasuk dalam perubahan skala besar dan sedang, serta memerlukan fasilitas lingkungan yang memadai. Penataan kawasan permukiman yang dipilih adalah konsep rehabilitasi dan redevelopment.

Rehabilitasi Kawasan Permukiman dan Rencana Prasarana Permukiman Kampung Ansus

Implementasi dari rehabilitasi lingkungan fisik adalah guna untuk menaikkan kondisi fisik lingkungan tersebut. Rehabilitasi bagi aspek fisik lingkungan adalah peningkatan prasarana lingkungan yang tidak tersedia maka perlu disediakan, demikian juga prasarana yang telah ada tetapi memiliki permasalahan maka perlu direhabilitasi.

a) Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Persoalan persampahan merupakan persoalan yang banyak timbul diberbagai kota di Indonesia termasuk di Kelurahan Ansus. Kecenderungan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya bisa berakibat fatal bagi keseimbangan dan perkembangan lingkungan. Hal tersebut juga yang terjadi pada lokasi studi dimana, masyarakat membuang sampah belum pada tempatnya. Umumnya sampah yang ada biasanya langsung dibuang ke selokan atau dibuang langsung ke saluran drainase, ini dilakukan masyarakat dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu ; a). Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, b). Tidak adanya fasilitas atau tempat pembuangan sampah

dilokasi studi, dan c). Letak TPS yang jauh dari tempat bermukim warga.

Adapun upaya untuk menghindari terjadinya masalah lingkungan seperti bahaya erosi tanah dan penyebaran penyakit, maka perlu dilakukan proses pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi :

- **Sistem Pewadahan**, yaitu melalui penyediaan tong-tong sampah di setiap rumah dan disetiap bangunan, dengan ukuran volume sampah yang ditampung adalah 40 – 60 liter, yang disediakan oleh masing-masing kepala keluarga.
- **Sistem pengumpulan**, proses pengumpulan sampahnya dapat dilakukan baik secara individu maupun secara komunal melalui bak-bak sampah penampungan yang disediakan disetiap unit lingkungan permukiman yang ada. Sampah domestik yang berupa sampah anorganik seperti plastik botol, kertas, dan lain-lain yang terdapat di lingkungan permukiman berlabuh (*rumah panggung*) diangkut memakai gerobak sampah ukuran 1 m³ ke lokasi TPS/Kontainer dengan kapasitas 7 m³. Sedangkan untuk sampah organik dikumpulkan untuk kemudian dijadikan makanan ternak.
- **Sistem Pemindahan**, Sistem pemindahan dan pengangkutan dari kontainer sampah dan dari tiap TPS menggunakan truk sampah menuju TPA.

Namun jika dilihat pada wilayah penelitian dimana didapati bahwa permasalahan penyediaan fasilitas pembuangan sampah merupakan hal yang sangat kurang dari kata memadai, sehingga untuk menampung produktivitas persampahan dirasakan sangat kurang bila dibandingkan dengan besarnya volume sampah secara keseluruhan di lokasi studi tahun 2020 yang sebanyak 11.247 liter/hari, dengan jumlah wadah yang dibutuhkan untuk wadah TPS berupa bak penampungan setidaknya tersedia 5 unit (per-unit menampung 7000 liter/3hari) untuk menampung produktivitas persampahan Kelurahan Ansus.

b) Pengelolaan Air Limbah

Umumnya sistem pembuangan air limbah pada RW 02 hingga RW 04 berupa limbah domestik (*rumah tangga*), yang mana pengelolaan air limbah domestik

umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem septic tank sedangkan Kampung Ansus pembuangan air limbah dilakukan secara langsung ke laut karena permukiman ini terdapat dilaut (*rumah panggung*).

c) Prasarana Jalan

Pada umumnya kondisi prasarana jalan pada Kampung Ansus kurang memadai atau dapat dikatakan belum baik terdapat di Kampung Ansus. Hal ini dapat terlihat dikarenakan pada umumnya akses menuju permukiman atau perumahan masyarakat menggunakan kayu sebagai jalan penghubung permukiman dan belum bisa dilewati oleh kendaraan khususnya roda 2.

Saat ini kondisi jalan yang ada pada wilayah studi cukup baik dengan jenis perkerasan aspal dengan lebar 3-8 meter yang terdapat di RW 01, 02, 03 dan 04. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi pada wilayah studi adalah : a). Terjadinya penyempitan jalan menuju akses permukiman yang disebabkan oleh penggunaan lahan untuk parkir kendaraan dan juga adanya pembangunan perumahan dan kios-kios yang mendekati bahu jalan (terdapat pada RW 01 dan 02), dan b). Badan ruas jalan yang sering hancur karena terbuat dari kayu dan papan pada saat musim hujan yang terdapat di Kampung Ansus (Kampung Ansus).

d) Air Bersih

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan berdasarkan hasil survey diketahui bahwa sistem air bersih yang ada dilokasi studi, terdiri dari sistem perpipaan yang sumber air bersihnya dari PDAM sedangkan untuk system pelayanan dan pendistribusian air bersih oleh PDAM dirasakan belum memadai.

Berdasarkan standar air bersih Dirjen Cipta Karya, ditetapkan bahwa kebutuhan air bersih per orang adalah 150 liter/orang/hari. Untuk memenuhi cakupan pelayanan air bersih di RW 01 hingga RW 06.

Dan dari pengamatan secara langsung pada lokasi studi didapati bahwa hampir sebagian besar dari 4 (empat) RW yang terdapat pada Kelurahan Ansus yaitu diantaranya RW 05 dan RW 06 memperoleh air bersih secara swadaya atau dalam arti masyarakat memperoleh air bersih dengan usaha dan upaya memanfaatkan air tanah

yang ada dengan menggunakan sumur bor dan diangkut dengan tenaga manusia ke permukiman mereka yang berada diatas laut. Adapun permasalahan yang dihadapi pada lokasi studi adalah : a). Pada musim kemarau umumnya pasokan air terhadap RW 05 dan RW 06 mengalami kendala karena pada umumnya sebagian penyediaan air bersihnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat, b). System pendistribusian air bersih dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia/masyarakat yang diangkut menuju ke permukiman mereka dilaut, dan c). Pemakaian air bersih yang di sediakan langsung oleh pihak PDAM secara umum di lokasi studi hanya berjalan selama 3 hari kerja dalam seminggu.

e) Drainase

Dalam pemanfaatannya, umumnya jaringan drainase sangat diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan serta air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Drainase yang terdapat pada Kelurahan Ansus dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu ; drainase terbuka dan drainase tertutup. Umumnya saluran drainase yang terdapat pada Kelurahan Ansus adalah saluran drainase terbuka dan tertutup yang mana pembuangan akhirnya adalah laut namun dalam unit lingkungan permukiman sebaiknya menggunakan sistem drainase terbuka yang mengikuti alur jalan pada tiap kawasan permukiman. Dari hasil pengamatan langsung dilapangan, dapat dijumpai beberapa permasalahan drainase yang terdapat pada lokasi studi, diantaranya : a). Adanya pengendapan material dan penumpukan sampah pada saluran drainase dan ini terjadi pada semua saluran drainase di lokasi studi (RW 01 dan 02), dan b). Belum adanya saluran drainase yang efisien di beberapa RW pada Kampung Ansus yaitu Kampung Ansus, hal ini dikarenakan permukiman penduduk berada diatas air (laut).

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN DI KAMPUNG ANSUS

Permasalahan permukiman di kampung Ansus cukup kompleks sehingga dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan ruang yang cukup komprehensif. Atas latar belakang tersebut, berdasarkan tinjauan

teoritis yang menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman di Kampung Ansus, maka bentuk pengelolaan yang dianggap sesuai dengan karakteristik permukiman Kampung Ansus adalah Redevelopment. Prinsipnya redevelopment dilakukan dengan konsep pembangunan permukiman baru sedangkan bangunan yang memenuhi kriteria uji kelayakan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Redevelopment

Ada beberapa pertimbangan dalam implementasi redevelopment bagi unit permukiman di Kampung Ansu yang perlu diperhatikan yaitu :

- Menata seluruh kawasan dan permukiman pada Kampung Ansus dalam bentuk redevelopment terhadap elemen-elemen ruang yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penduduk serta kondisi fisik unit kawasan lingkungannya, agar terciptanya kesesuaian antara unsur alam dan buatan sehingga mewujudkan perimbangan antara ketersediaan ruang dan daya dukung lingkungan.
- Konsep penataan permukiman secara redevelopment, sebaiknya mempertimbangkan keadaan dan kondisi penduduk yang umumnya berpenghasilan rendah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat tersebut.
- Memberikan subsidi bagi penduduk yang terkena redevelopment.
- Memperhatikan konsep penataan permukiman yang disesuaikan dengan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan.
- Redevelopment dilakukan terhadap bangunan hunian yang tidak layak atau sesuai standar hunian perumahan.

Pengarahannya Konsep Redevelopment

Pengarahannya konsep redevelopment selanjutnya akan diimplementasikan menjadi tolak ukur dalam melakukan upaya peningkatan permukiman pada kawasan Kampung Ansus yang meliputi :

- Memperhatikan batasan pengembangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Nomor 4 Tahun 2004 adalah KDB 70 %.

- b) Memperhatikan batasan pengembangan yang ditentukan melalui ketentuan teknis arah pengaturan bangunan dan rumah didalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 70-80 % untuk kawasan yang memiliki kepadatan tinggi.
- c) Memperhatikan batasan pengembangan luas areal lahan yang disesuaikan dengan RDTRK Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu luas lahan WEP sebesar 21,32 Km², sehingga terciptanya suatu kawasan yang berimbang antara ketersediaan ruangdan daya dukung lingkungan pemanfaatan dan pengembangannya.
- d) Mengelola dan menciptakan keserasian perkembangan kawasan permukiman serta daya dukung lingkungan yang mendorong keterpaduan antara perkembangannya dengan lingkungan alam di wilayah studi sehingga menjamin kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
- e) Menciptakan keterpaduan penataan kawasan permukiman dengan kondisi utilitas terhadap penyediaan sarana dan prasarannya.
- f) Menjamin konsistensi perkembangan permukiman dengan strategi permukiman nasional dan arahan penataan tata ruang Kota dalam jangka panjang.

Arahan Konsep Redevelopment

Berdasarkan pertimbangan dan arahan maka konsep redevelopment dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Menyediakan unit perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan karakteristik kondisi masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya).
- b) Menciptakan kawasan permukiman yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga mencerminkan estetika bermukim yang baik.
- c) Kondisi fisik lahan permukiman yang umumnya merupakan area laut sehingga membutuhkan penanganan dan pengendalian terhadap penilaian kondisinya agar terciptanya kelestarian pemanfaatan ruang untuk perkembangannya.
- d) Kegiatan pemanfaatan lahan yang selama ini telah berjalan cukup baik, dan pada tahapan selanjutnya arah orientasi dapat mengikuti paradigma sebagai kawasan permukiman, haruslah lebih menekankan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efektif dan

efisien. Yang selaras dengan fungsi ekologis atau dengan istilah pembangunan permukiman berwawasan lingkungan.

e) Memperhatikan konsep pengadaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini dalam rangka mendukung kinerja sumber daya yang tersedia agar benar-benar terarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.

f) Peningkatan kualitas bermukiman melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dimaksud untuk mengendalikan dan mewujudkan kawasan yang indah, sehat dan bersih.

Konsep Penataan Permukiman Kelurahan Ansus

Perumusan konsep pemanfaatan lahan dalam penataan kawasan permukiman Kelurahan Ansus Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

- a) Kondisi fisik lahan permukiman yang umumnya merupakan area dataran rendah dan wilayah yang berada diatas air sehingga membutuhkan penanganan dan pengendalian terhadap penilaian kondisinya agar terciptanya kelestarian pemanfaatan ruang untuk perkembangannya.
- b) Kegiatan pemanfaatan lahan yang selama ini telah berjalan cukup baik dan pada tahapan selanjutnya arah orientasi dapat mengikuti paradigma sebagai kawasan permukiman, haruslah lebih memperhatikan aspek kelengkapan sarana prasarana permukiman.
- c) menekankan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Yang selaras dengan fungsi ekologis atau dengan istilah pembangunan permukiman berwawasan lingkungan.
- d) Memperhatikan konsep pengadaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini dalam rangka mendukung kinerja sumber daya yang tersedia agar benar-benar terarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.
- e) Peningkatan kualitas bermukiman melalui pengadaan prasarana yang di maksud untuk mengendalikan dan mewujudkan kawasan yang indah, sehat dan bersih.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah : 1). Tingkat perekonomian di lokasi studi sangat berpengaruh terhadap kondisi permukiman penduduk yang buruk hal ini dapat disebabkan karena tingkat tingkat penghasilan yang rendah (minimum), sehingga tidak mampu membangun rumah yang dihuninya. Penghasilan sekitar 58 % penduduk kampung ansus mempunyai tingkat penghasilan yang rendah, dan 2). Permasalahan permukiman di Kampung Ansus cukup kompleks, terutama pada kondisi infrastruktur yang kurang memadai, 3). Kompleksitas permasalahan di Kampung Ansus yang cukup tinggi melatarbelakangi redevelopment menjadi strategi yang dipilih untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kampung Ansus, sebab beberapa kondisi yang cukup parah akan bertambah parah jika tidak segera ditangani dengan cara dibangun kembali atau perbaikan total.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian adalah : 1). Perlu adanya pengontrolan dan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, 2). Dalam upaya melakukan pengelolaan dan penataan permukiman maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri agar terciptanya suatu kawasan permukiman yang sesuai dengan kondisi eksisting kawasan tersebut, dan 3). Agar perkembangan permukiman dapat terkontrol, maka diperlukan pembentukan peraturan daerah sebagai fungsi kontrol bagi pembangunan permukiman.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2009, *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen*, Kabupaten Kepulauan Yapen

Budihardjo, Eko, 2006, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit PT. Alumni, Bandung

Dirjen Cipta Karya, 2001, *Standar Permukiman Kumuh*, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta

KEPMEN PU NO,441/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Jakarta

Komarudin, 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan Realestat Indonesia-PT. Rakasindo, Jakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung